

Dampak Harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan terhadap Peran Akuntansi, Perkembangan Profesi Akuntan dan Pendidikan Akuntansi

Lilik Purwanti

Abstract: Globalization bring very big change and push the happening of growth of very fast information. Various information expanding direspon quickly, society easily obtain; get wanted information it so that many decision can be made quickly and is accurate. Accountancy service partake to rapidly grow along with progress of global economics. Some party realize the importance of determined a standard rule of the game. This matter push making of an accountancy standard so that can improve the quality of monetary information. With Financial Accounting Standard harmonization expected presented accounting information every state earn quickerly, more able to be easy to comprehended, and can be used for decision making all user. Harmonization influence growth in financial reporting so that will have an effect on also change of audit methodologies. Along with progress of information and technology, accountant profession claimed to expand. This profession demand which push accountant to progressively to develop knowledge, skilled, ethics and education become full responsibility of this profession. Financial Accounting Standard harmonization affect also at education of accountancy marked by appearance of subject pregnant of international element, that is international accountancy, international monetary management and international business.

Keywords: harmonization, globalization, financial accounting standard, and international subject

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia senantiasa tanggap terhadap perkembangan masyarakat khususnya dunia usaha. Sejak berdiri tahun 1957, Ikatan akuntan Indonesia telah tiga kali menyusun dan merevisi standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1973 untuk pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku, yang dikenal dengan nama Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Pada tahun 1984 sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan akuntansi, Komite PAI-IAI telah melakukan revisi secara mendasar atas PAI dan hasil revisi tersebut dikodifikasi dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 sebagai pengganti Prinsip Akuntansi Indonesia 1973.

Sejak tahun 1986 Komite PAI-IAI menerbitkan serangkaian Pernyataan dan Interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Terjadinya globalisasi ekonomi dan semakin aktifnya pasar modal di Indonesia menyebabkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 serta serangkaian Pernyataan dan Interpretasi PAI yang selama ini berlaku ternyata sudah tidak dapat lagi menampung dan menjawab permasalahan yang timbul dalam praktik (IAI, 1994). Era globalisasi sejalan dengan program harmonisasi standar akuntansi internasional yang diprakarsai oleh *International Accounting Standards Committee (IASC)*, Ikatan Akuntan Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi *International Accounting Standards* sebagai dasar acuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Fenomena globalisasi ini memberikan suatu tantangan kepada akuntansi keuangan, yang sejak dulu sebagai bahasa bisnis. Kalau biasanya setiap negara memiliki bahasa akuntansi keuangan sendiri, tetapi sekarang muncul tuntutan untuk memiliki bahasa yang

sama. Standar Akuntansi Keuangan yang memungkinkan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang mampu melintasi batas-batas negara telah diargumentasikan menjadi suatu kebutuhan. Perspektif ini memunculkan ide untuk menyusun standar akuntansi yang diharmonisasikan dengan Standar Akuntansi Internasional (SAI). Diharapkan laporan keuangan antar negara menjadi lebih dapat dibandingkan. Dan pasar modal internasional menjadi lebih efisien.

HARMONISASI VERSUS STANDARISASI

Standarisasi adalah pemberlakuan atau penerapan suatu set standar yang sempit dan baku. Standarisasi merupakan suatu set standar yang harus diterapkan di semua situasi. Standarisasi tidak menampung perbedaan nasional, dan oleh karena itu lebih sulit untuk diterapkan secara internasional. Namun, ternyata standarisasi adalah suatu hal yang terlalu ambisius untuk dicapai, dan tidak realistis. Akhirnya dalam *Preface and Constitution* tahun 1982 dinyatakan bahwa tujuan harmonisasi adalah lebih perlu untuk dicapai. Harmonisasi adalah proses peningkatan komparabilitas praktik akuntansi dengan memberikan batas seberapa banyak variasinya. Harmonisasi standar meminimumkan konflik dan meningkatkan komparabilitas informasi keuangan dari negara-negara yang berbeda (Choi, *et al.*, 1999:248).

Harmonisasi lebih fleksibel dan terbuka dan tidak menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua. Konsep harmonisasi berarti bahwa standar yang berbeda boleh berlaku di masing-masing negara anggota, selama standar tersebut "selaras" satu sama lain berarti bahwa standar tersebut secara logis seharusnya tidak boleh bertentangan.

Yang perlu diperhatikan, harmonisasi "membolehkan" dengan pengungkapan yang memadai, sedangkan standarisasi "mengharuskan" semua perusahaan, jika perusahaan tersebut ingin mentaati prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP). Dengan demikian, harmonisasi menghasilkan hasil pengukuran akuntansi dan keuangan yang berbeda dibandingkan dengan standarisasi.

HARMONISASI STANDAR AKUNTANSI

Tujuan awal membuat harmonisasi, merupakan strategi induk perusahaan untuk lebih banyak melakukan ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan di berbagai wilayah di negara lain. Jika harmonisasi

akuntansi internasional dapat tercipta, maka pemahaman atas penyajian informasi baik induk perusahaan maupun anak perusahaan dan sebaliknya, maupun kepada masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap pelaporan, tidak memerlukan proses yang rumit.

Sebelum ada harmonisasi masing-masing perusahaan membuat laporan yang sesuai dengan kaidah prinsip akuntansi yang umum di negara tersebut.

Proses tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kandungan informasi keuangan yang direncanakan semula menjadi bias setelah banyak mengalami translasi ke berbagai negara. Dengan adanya harmonisasi akuntansi maka masing-masing pihak dapat lebih mempercayai kualitas informasi yang disajikan, karena informasi disusun menggunakan standar internasional, sehingga bias informasi tersebut lebih mudah diminimalisasi.

Namun, penerapannya kembali lagi pada sistem yang dianut oleh masing-masing negara. Sebab laporan dari informasi akuntansi digunakan oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang beragam dan mungkin berlawanan. Masalah ini menjadi lebih kompleks lagi dengan turut campur tangannya pemerintah suatu negara atas proses pelaporan akuntansi dari lembaga ekonomi yang berdomisili di wilayah itu.

Harmonisasi akuntansi meliputi harmonisasi (1) standar akuntansi, yang berkaitan dengan penilaian dan pelaporan; (2) pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan publik di bursa terkait dengan penawaran sekuritas dan pencatatan di bursa efek; (3) standar audit (Choi, *et al.*, 1999:249).

Pada bab pengantar SAK 1994 disebutkan bahwa berlandaskan pada Strategi Pengembangan Akuntansi 1994–2000 Ikatan Akuntan Indonesia, telah memutuskan dan melaksanakan hal-hal penting sebagai berikut:

- Mendukung program harmonisasi yang diprakarsai *International Accounting Standards Committee (IASC)* dengan mengharmonisasikan Prinsip Akuntansi Indonesia dengan *International Accounting Standards*.
- Memberlakukan "*Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*" yang disusun IASC sebagai Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Informasi Keuangan di Indonesia. Kerangka dasar ini merupakan rujukan penting bagi badan penyusun standar akuntansi keuangan dan bagi penyusun laporan

keuangan serta bagi auditor dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam standar akuntansi keuangan yang ada. Tapi perlu dipahami bahwa kerangka dasar tersebut bukanlah suatu standar akuntansi keuangan.

- Untuk menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi dan agar nama sesuai dengan makna, maka telah disepakati untuk mengganti sebutan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dengan Standar Akuntansi Indonesia (SAK).
- Sehubungan dengan itu, maka seri Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia (Pernyataan PAI) yang diterbitkan Komite PAI untuk mengubah suatu standar akuntansi keuangan yang telah berlaku atau menambah suatu standar akuntansi keuangan yang baru, diubah menjadi Pernyataan standar akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan Interpretasi Prinsip akuntansi Indonesia (IPAI) yang diterbitkan untuk menjelaskan sesuatu yang dianggap perlu atas standar akuntansi keuangan yang telah ada, diubah menjadi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (INSAK).
- Dengan berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia No. 1–No. 35, maka Standar Akuntansi Indonesia sebagaimana diatur dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984, Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 1–No. 7, dan Interpretasi Prinsip akuntansi Indonesia No. 1 sampai dengan No. 9 dinyatakan tidak berlaku lagi untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995.

Harmonisasi didasarkan pada suatu perspektif bahwa profesi akuntan di Indonesia haruslah menjawab tantangan globalisasi. Globalisasi ekonomi sekarang memang sedang dan akan terus terjadi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional didirikan dan berkembang yang memungkinkan terjadinya peralihan teknologi dan modal. Beberapa perusahaan nasional juga mulai berusaha mendapatkan dana di pasar modal luar negeri. Alasan globalisasi ini yang memberikan suatu tantangan kepada akuntansi keuangan, yang sejak dulu dikenal sebagai bahasa bisnis. Sebelumnya setiap negara memiliki bahasa akuntansi keuangan sendiri, sekarang muncul tuntutan untuk memiliki bahasa yang sama. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang memungkinkan untuk

menghasilkan informasi akuntansi yang mampu melintasi batas-batas negara telah diargumentasikan menjadi suatu kebutuhan. Perspektif ini memunculkan ide untuk menyusun standar akuntansi Internasional (SAI), yang kemudian diikuti dengan harmonisasi standar akuntansi. Diharapkan laporan keuangan antar negara menjadi lebih dapat dibandingkan dan pasar modal Internasional menjadi efisien (Heaston & Wolk, 1992; Tang, 1994).

Internasionalisasi standar akuntansi merupakan upaya yang penuh konflik. Beberapa negara, standar akuntansi dibentuk secara politis dan di negara lain melalui mekanisme profesional pihak swasta. Oleh karena itu, muncul beberapa masalah tentang bagaimana standar internasional harus diciptakan.

Munculnya keinginan untuk memiliki Standar Akuntansi Internasional (SAI) ini bermula pada Kongres Internasional Akuntan di St. Louis, Missouri, USA tahun 1904 (Choi & Mueller, 1976). Alasannya bahwa banyak kantor akuntan publik suatu negara, terutama Amerika dan Inggris, memiliki klien di negara lain. Mereka memerlukan akuntan yang menguasai masalah praktik yang bervariasi dan standar akuntansi keuangan yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya.

Pada tahun 1972 di *International Congress of Accountants* di Sydney, Australia, ditandatangani sebuah *Agreement and Constitutions* oleh sembilan negara yang mengatur tata cara pembentukan *The International Accounting Standard Committee* (IASB). Pada bulan Juni 1973, wakil-wakil dari organisasi profesi akuntansi beberapa negara (seperti Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat) berhasil membentuk kepengurusan IASB. Organisasi internasional inilah yang kemudian menjadi salah satu sari organisasi profesi akuntan yang secara terus-menerus menyuarakan pentingnya memiliki standar akuntansi internasional.

Tujuan IASB menurut konstitusinya adalah untuk menyusun dan menerbitkan standar akuntansi yang akan dipakai dalam penyusunan laporan keuangan dan untuk mendorong penerimaan dan pemakaian standar akuntansi tersebut di seluruh dunia. IASB juga menyusun dan menerbitkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang menjadi pedoman bagi dewan pengurus untuk menyusun SAI.

Apakah Harmonisasi akuntansi Memungkinkan dengan Perbedaan-perbedaan Budaya?

Perbedaan-perbedaan budaya menjadikan harmonisasi standar akuntansi sangat sulit untuk diwujudkan. Jika kita mencermati pengaruh agama/kepercayaan terhadap keputusan investasi dan finansial dikombinasikan dengan pengembangan prinsip-prinsip dan praktik akuntansi terhadap akuntansi untuk transaksi bisnis global. Misalnya, kita dapat menemukan haramnya sistem bunga (riba) dalam Islam, hanya merupakan satu dari sekian banyak elemen budaya yang membuat harmonisasi standar akuntansi menjadi lebih sulit.

Hambatan dan Pendukung terhadap Harmonisasi dan Standarisasi Internasional

Dewasa ini harmonisasi akuntansi merupakan sebuah permasalahan yang menantang dan kontroversial berkaitan dengan pembuatan standar akuntansi dan peraturan pasar secara profesional. Diskusi-diskusi yang dilakukan saat ini berfokus pada pengalaman dari Amerika Utara, Inggris dan Daratan Eropa (Hegarty 1997, Zarzeski 1996, Bayless, *et al.*, 1996). Diskursus akuntansi internasional diwarnai oleh suatu kecenderungan utama untuk mendukung argumen-argumen akan pentingnya program harmonisasi.

Pandangan yang mendukung harmonisasi internasional bahwa harmonisasi (atau bahkan standarisasi) memiliki banyak keuntungan. Keuntungan terbesar dari harmonisasi adalah adanya komparabilitas informasi keuangan internasional. Komparabilitas tersebut akan menghilangkan kesalahpahaman mengenai reliabilitas laporan keuangan "asing" dan akan menghapus salah satu hambatan paling penting dalam aliran investasi internasional. Keuntungan kedua dari harmonisasi adalah hemat waktu dan biaya yang sebelumnya dihasikan untuk mengkonsolidasi informasi keuangan yang berbeda-beda ketika lebih dari satu laporan dibutuhkan untuk memenuhi praktik atau hukum internasional yang berbeda-beda. Keuntungan ketiga dari harmonisasi akan terpusatnya standar akuntansi dunia yang ditingkatkan ke tingkat lebih tinggi dan konsisten dengan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum lokal (Turner, 1983).

Ada beberapa argumen yang menentang program ini, misalnya ada yang berpendapat bahwa harmonisasi merupakan sesuatu yang "tidak mungkin dan impian yang tidak perlu." (Goeltz, 1991).

Pengungkapan bahwa proses harmonisasi ini telah didominasi oleh negara-negara maju, terutama Inggris dan Amerika Serikat (Hoarau, 1995; Rivera, 1989; Chandler, 1992 dan Gokarn, 1984). Walaupun ada kesepakatan bahwa didalam dewan komite IASC paling tidak ada 3 organisasi profesi yang mewakili negara-negara sedang berkembang, peranan mereka dalam diskusi-diskusi amatlah kecil. Di awal 1973 beberapa pihak mengatakan bahwa standar internasional merupakan solusi terlalu sederhana untuk masalah yang kompleks.

DAMPAK HARMONISASI TERHADAP PERAN AKUNTANSI

Globalisasi membawa perubahan yang sangat besar. Hal ini telah mendorong terjadinya perkembangan informasi yang sangat pesat pula. Berbagai informasi yang berkembang direspon cepat. Masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang diinginkannya sehingga banyak keputusan dapat dibuat secara cepat dan akurat.

Era informasi menuntut adanya inovasi baru. Jaringan internet dapat membuat segalanya dimanfaatkan untuk menginformasikan berbagai perkembangan yang ada. Posisi keuangan, kebijakan perusahaan serta kinerja perusahaan yang lainpun dapat diinformasikan secara cepat dan mudah. Hal ini akan mendorong kemudahan bagi masyarakat dalam menentukan sebuah keputusan. Bahkan pada masa yang akan datang, era perdagangan akan berjalan secara elektronik 24 jam dan menggloabal.

Jasa akuntansi turut berkembang pesat seiring dengan kemajuan perekonomian global. Beberapa pihak menyadari perlunya ditentukan suatu aturan permainan baku. Hal ini mendorong dibuatnya suatu standar akuntansi agar dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan. Salah satu kualitas informasi akuntansi adalah daya banding. Untuk lebih dapat dibandingkan maka laporan keuangan harus disajikan menggunakan pedoman penyusunan atau standar yang sama antar negara. Dengan harmonisasi standar akuntansi keuangan diharapkan informasi akuntansi yang disajikan setiap negara dapat lebih cepat, lebih bisa mudah dipahami, dapat digunakan untuk pengambilan keputusan semua pemakai.

Perbedaan nasional dalam faktor mendasar yang mendorong adanya variasi dalam praktik akuntansi, pelaporan, dan audit semakin menyempit ketika pasar produk dan modal menjadi lebih internasional.

Perusahaan juga secara sukarela memperluas pelaporan mereka bergerak menuju normal global, menanggapi permintaan dari investor institusional dan pengguna laporan keuangan lainnya. Ternyata keberhasilan usaha harmonisasi oleh organisasi internasional mungkin sangat mencerminkan kenyataan bahwa harmonisasi merupakan respon alamiah terhadap kekuatan ekonomi.

DAMPAK HARMONISASI TERHADAP PERKEMBANGAN PROFESI AKUNTAN

Globalisasi profesi akuntansi salah satu dampak dari harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan. Proses globalisasi profesi akuntansi sudah mulai berjalan dengan dikeluarkannya *7 Statement of Membership Obligation* (SMO) oleh *International Federation of Accountants* (IFAC) yang antara lain terdiri dari:

- SMO 1: *Quality Assurance* yang mewajibkan setiap asosiasi anggota IFAC untuk membuat dan mempublikasikan *quality control standards and guidance* dan mewajibkan semua kantor akuntan untuk menerapkan *system of quality control* yang sesuai dengan *International Standards on Quality Control* (ISQC).
- SMO 3: *International Standards, Related Practice Statement and Other Papers*, yang mewajibkan setiap asosiasi anggota IFAC untuk mengadopsi standar audit yang diterbitkan oleh IAASB.
- SMO 4: *IFAC Code of Ethic for Professional Accountants* yang mewajibkan setiap asosiasi anggota IFAC untuk menyesuaikan kode etiknya dengan mengacu pada IFAC Code sebagai basisnya.
- SMO 5: *International Public Sector Accounting Standards and Other PSC Guidance* yang mewajibkan setiap asosiasi anggota IFAC untuk mengadopsi IPSAS.
- SMO 6: *Investigation and Discipline* yang mewajibkan setiap asosiasi anggota IFAC untuk menyediakan sarana yang efektif untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran keprofesian dan menjatuhkan sanksi bagi setiap pelanggaran.
- SMO 7: *International Financial Reporting Standards* yang mewajibkan setiap asosiasi anggota IFAC untuk mengadopsi IFRS (Hadibroto, 2007).

Profesi akuntan merupakan profesi utama yang bermain dalam kegiatan penyusunan dan penerapan sebuah standar. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, profesi akuntan dituntut untuk berkembang. Tuntutan profesi ini yang mendorong akuntan untuk semakin mengembangkan wawasan, keterampilan, pendidikan dan etika menjadi tanggung jawab penuh dari profesi ini. Perkembangan profesi ini akan mengarah pada perkembangan atas kegiatan para akuntan. Keterampilan para akuntan dalam menyajikan keuangan akan semakin dituntut untuk berkembang. Para akuntan yang memfokuskan pada suatu database pelaporan keuangan akan dituntut guna menyajikan suatu laporan keuangan yang memudahkan dalam membandingkan antar perusahaan secara lebih terperinci.

Muncul dan berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional menyebabkan klien akuntan publik melintasi batas-batas negara (*home country*) mereka. Dengan demikian, adanya satu standar akuntansi yang berlaku secara internasional akan memberikan kemudahan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Harapan para akuntan publik adanya satu standar akuntansi merupakan mimpi sejak munculnya istilah harmonisasi yang lebih realistis daripada standarisasi.

Pengembangan dalam pelaporan keuangan akan memerlukan perubahan metodologi audit. Bahkan nantinya bakal mengurangi lahan audit dalam aktivitas Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP-KAP tampaknya perlu mempersiapkan diri menjadi konsultan keuangan pula. Kecepatan atas penguasaan, pemrosesan, dan perolehan informasi akan memiliki nilai tambah dengan biaya yang semakin terjangkau. Peran akuntan akan semakin sentral sebagai pengolah informasi, bahkan banyak pihak yang belum memahami transformasi di pasar modal. Hal ini menimbulkan suatu kebutuhan atas informasi keuangan, khususnya yang mendasari suatu keputusan. Profesi ini tampaknya akan semakin bergerak sehingga setiap data akan semakin berarti di dalam pengambilan keputusan.

Masalah muncul setiap ada standar baru yang diterbitkan untuk menyempurnakan keberadaan standar tersebut. Apalagi dengan turut campur-tangannya peranan pemerintah di beberapa negara sebagai penentu ekonomi, semakin menjadikan profesi ini layaknya nahkoda sebuah kapal yang berlayar di tengah samudra.

Sebuah profesi baru dari penyusun standar mungkin juga berkembang, yang akan menjadi tema internasional. Meski berasal dari lingkup yurisdiksi yang berbeda, mereka akan saling bekerja sama dalam proyek bersama sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tampaknya akan semakin berkurang.

Asumsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasar keuangan akan mengglobal. Namun demikian, peran pemerintah tidak dapat diabaikan begitu saja. Beberapa negara bahkan menggodok suatu peraturan guna mencegah pelarian modal. Dunia elektronik seringkali lebih cepat berkembang daripada kesiapan personalnya. Kecepatan atas penguasaan, pemrosesan, dan perolehan informasi akan memiliki nilai tambah dan biaya yang semakin terjangkau. Peran akuntansi akan semakin sentral sebagai pengolah informasi. Bahkan banyak pihak yang belum memahami transformasi di pasar keuangan, khususnya yang mendasari suatu keputusan. Profesi ini tampaknya semakin bergerak sehingga setiap data semakin berarti di dalam pengambilan keputusan.

DAMPAK HARMONISASI TERHADAP PENDIDIKAN AKUNTANSI

Proses harmonisasi juga berdampak pada pendidikan akuntansi dengan dikeluarkannya *7 Statement of Membership Obligation (SMO)* oleh *International Federation of Accountants (IFAC)*. Yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi adalah *SMO 2: International Education Standards for Professional Accountants and Other. EDCOM Guidance* yang mewajibkan setiap asosiasi anggota IFAC untuk menerapkan *International Education Standards* (Hadibroto, 2007).

Di Indonesia Program harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan oleh IAI berdampak pada pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Sebelum Agustus 2004 lulusan jurusan akuntansi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia langsung mendapat gelar akuntan. Setelah Agustus 2004, gelar akuntan harus diperoleh oleh mahasiswa yang lulus pendidikan S1 akuntansi dengan menempuh beberapa matakuliah pada Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK). Artinya, bahwa untuk menjadi seorang akuntansi, maka lulusan S1 akuntansi harus mendapatkan pendidikan tambahan secara khusus, dengan materi-materi yang lebih spesifik ke profesi akuntan. Dengan pendidikan tambahan melalui pendidikan PPAK

diharapkan lulusan S1 akuntansi sudah siap terjun ke dunia profesi akuntan.

Dampak yang lain adalah munculnya matakuliah yang mengandung unsur internasional, yaitu akuntansi internasional, manajemen keuangan internasional dan bisnis internasional. Matakuliah-matakuliah tersebut harus ditempuh oleh mahasiswa S1 jurusan akuntansi. Materi harmonisasi standar akuntansi terdapat pada matakuliah akuntansi internasional. Membutuhkan pengkajian khusus untuk memecahkan masalah, apakah: (1) Materi tersebut dapat diberikan dalam matakuliah sendiri yaitu akuntansi internasional atau masuk ke matakuliah yang sudah ada. (2) Kalau matakuliah berdiri sendiri, apakah sebagai matakuliah wajib atau pilihan, (3) Tujuan dari pengajaran akuntansi internasional dan apa saja isi matakuliah tersebut.

Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia matakuliah-matakuliah akuntansi internasional, manajemen keuangan internasional dan bisnis internasional menjadi matakuliah pilihan yang berdiri sendiri. Dengan perkembangan pendidikan yang mengglobal, tidak mustahil nanti jangka panjang matakuliah-matakuliah tersebut menjadi wajib ditempuh oleh mahasiswa.

Akuntansi internasional telah dijadikan sebagai salah satu prasyarat mendapat akreditasi *American Assembly of Collegiate School of Business* sejak tahun 1974 di US, walaupun beberapa Universitas disana telah memberikan materi ini sejak awal 1960an. (Gray & Roberts, 1984). Di UK, matakuliah akuntansi internasional tidaklah harus dimasukkan ke dalam kurikulum, tetapi topik-topik yang berhubungan diberikan pada matakuliah akuntansi lainnya. Menurut Mintz (1980) yang ideal semestinya untuk tujuan jangka panjang adalah semua matakuliah akuntansi yang bersifat domestik perlu diinternasionalkan. Kalau semua matakuliah sudah diinternasionalkan maka tidak perlu lagi matakuliah akuntansi internasional secara khusus. Perlu dianalisis benar atau salah pernyataan berikut, dimasa mendatang ijazah sarjana akuntansi dan ijazah akuntan dari Universitas di Indonesia dan sertifikat akuntan yang diperoleh dari IAI hanya akan diakui di Indonesia jika program pendidikan dan program sertifikasi akuntannya tidak mengacu pada standar pendidikan akuntansi internasional dan materi standar akuntansi dan standar auditingnya bukan IFRS dan IAS. Sebaliknya, kesempatan bagi akuntan Indonesia untuk bekerja di mana saja di dunia ini akan terbuka luas jika program pendidikan akuntansi

yang mereka tempuh adalah program yang sesuai dengan standar internasional (Hadibroto:2007)

KESIMPULAN

Era globalisasi ekonomi dan semakin aktifnya pasar modal di Indonesia menyebabkan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku umum di Indonesia (PAI) ternyata sudah tidak dapat lagi menampung dan menjawab permasalahan yang timbul dalam praktik. Ikatan Akuntan Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi *International Accounting Standards* sebagai dasar acuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Harmonisasi standar akuntansi keuangan berdampak pada peran akuntansi yang harus menyajikan informasi akuntansi yang disusun berdasarkan standar akuntansi internasional agar dapat dipublikasikan di negara lain, dapat meningkatkan daya banding dan harus lebih cepat dalam penyajian dan pengkomunikasian. Harmonisasi juga berdampak pada munculnya matakuliah akuntansi yang bersifat internasional seperti akuntansi internasional, manajemen keuangan internasional, bisnis internasional dan lain-lain dalam kurikulum atau mungkin untuk tujuan jangka panjang semua matakuliah akuntansi yang bersifat domestik perlu diinternasionalkan. Dampak lain harmonisasi terhadap profesi akuntansi yang bermain dalam kegiatan penyusunan dan penerapan sebuah standar. Profesi akuntan yang dituntut untuk semakin mengembangkan diri dalam wawasan atau pengetahuan, keterampilan, pendidikan dan etika yang menjadi tanggungjawabnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Albrecht, W.S., DC. Clark, JM, Smith, KD. Stock and LW. Woodfirl. *An Accounting Curriculum for the Next Century, Issue in Accounting Education*. 1994. pp.401-425.
- Choi, F.D.S., and Gary, KM. 2005. *International Accounting*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Goeltz, K.R. International Accounting Harmonization: The Impossible (And Unnecessary?) Dream. *Accounting Horizon* (March 1991). Pp. 85-88.
- Hadibroto, A. "Peran IAI KAPd dan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam menghadapi Tantangan Globalisasi" *Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Standa kualitas Pendidikan Tinggi Akuntansi*. 12-13 April 2007.
- Hulle, van Karel. International Harmonization of Accounting Principles: A European Perspective. *Wirtschafts pruferkammer-Mitteilungen, special edition* (June 1997). Pp. 44-50.
- Naim, A. Review on International Education Satandards (IES) for Professional Accountants. *Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Standa kualitas Pendidikan Tinggi Akuntansi*. 12-13 April 2007.
- Peter, A. Aghimien. International Harmonization of Accounting Standards. *Journal of Accounting and Finance Research*. 1999. pp. 83.
- Turner, N. and John. International Harmonization: A Professional Gold. *Journal of Accountancy* (January 1983). pp. 59-59.

Perbedaan IFRS, U.S. GAAP, dan PSAK: *Investement Property*

Nunik L.D.

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. Drg. Surya Sumantri No. 65 Bandung)

Abstract

International accounting standards convergence which has been done through adopting IFRS completely by DSAK is IAS 40 Investment Property. Based on these adopting, there will be differentiation between IFRS, U.S. GAAP and PSAK. But for PSAK valid in January 1st 2008 (SAK in July 1st 2009), there are no differentiation with IFRS because PSAK adopts IFRS completely, but between IFRS, PSAK and U.S. GAAP have differentiation. This paper will only discuss about the differentiation between IFRS, U.S. GAAP and PSAK in investment property, especially related to the differentiation of IFRS, U.S. GAAP and PSAK in presentation, recognition, measurement and disclosure.

Keywords: *IFRS, U.S. GAAP, PSAK, Investment Property.*

Pendahuluan

Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan mengenai transaksi (kejadian ekonomi dan keuangan) suatu organisasi, baik organisasi profit maupun non profit untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun pihak eksternal organisasi. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kondisi organisasi yang sebenarnya. Menurut Ball and Brown (1968) dalam Hoesada (2008), informasi yang dihasilkan laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan disamping yang berasal dari sumber lain, baik informasi keuangan dan non keuangan, dan hal ini telah banyak dibuktikan secara alamiah walaupun informasi dalam laporan keuangan (hanya) berisi kejadian atau peristiwa yang telah terjadi (*post information*), karena laporan keuangan berdaya prediksi. Dengan demikian laporan keuangan yang disajikan oleh suatu organisasi harus dapat dipahami, relevan, dan dapat diandalkan, serta dapat dibandingkan, agar berguna bagi pembuat keputusan atau pengguna laporan keuangan tersebut.

Demi memperoleh informasi berdaya banding dan berterima nasional dan global antara penyusun laporan keuangan dan penggunaannya (khususnya investor), sehingga tidak menimbulkan informasi yang asimetris (*asymetric information*) dan untuk mencegah *moral hazard*, maka diperlukan suatu standar akuntansi yang berkualitas tinggi, memberi rambu-rambu dan memandu perilaku usaha yang sehat (Scott 2000 dalam Hoesada 2008). Penggunaan standar akuntansi internasional di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1973 dan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan aturan diantaranya: pertama, menggunakan aturan Belanda; kedua menggunakan aturan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dari Amerika Serikat; dan kemudian yang ketiga atau hingga saat ini menggunakan *International Accounting Standards* (IAS). Dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi dikenal dengan dua pendekatan (Hoesada, 2008), yaitu:

1. *Principle-Based Accounting Standards:*
 - a. Mengatur prinsip-prinsip akuntansi untuk suatu jenis transaksi, khususnya terkait dengan pengakuan dan pengukuran, dan tidak mengatur untuk suatu jenis industri tertentu.
 - b. Kelebihannya: tidak atau sedikit memberi peluang untuk melakukan kreativitas negatif atas pengaturan akuntansi. Sehingga dua transaksi yang secara substansi sama akan diperlakukan dan dicatat sama oleh dua perusahaan yang berbeda. Serta pengaturan akuntansi yang ada berlaku untuk seluruh perusahaan.
 - c. Memerlukan banyak *professional judgement* yang menuntut kompetensi dan integritas yang tinggi, kesiapan profesi pendukung dengan semakin dominannya *fair value accounting*.
 - d. Digunakan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB).
2. *Ruled-Based Accounting Standards:*
 - a. Mengatur secara lebih detail dan biasanya hanya berlaku untuk suatu industri tertentu.
 - b. Kelebihannya: lebih mudah diterapkan karena pengaturan lebih eksplisit.
 - c. Tidak banyak memerlukan *professional judgement*. Namun, membuka peluang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan sempit.
 - d. Digunakan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB).

FASB merefleksikan tingkat kecanggihan dan adidaya ekonomi dan keuangan Amerika Serikat, sebaliknya IAS berupaya merangkul seluas-luasnya semua negara dunia dari yang paling canggih-kaya sampai pada negara yang paling miskin-terbelakang (Hoesada, 2008).

Konvergensi IFRS terhadap PSAK akan menyebabkan PSAK yang tadinya bersifat *Ruled-Based* menjadi bersifat *Principle-Based*. Selain itu, konvergensi IFRS terhadap PSAK menuntut akuntan harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menyusun laporan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pembuat keputusan dalam mengambil keputusan yang tepat. Menurut Hoesada (2008), konvergensi standar akuntansi internasional dapat dilakukan dengan adopsi IFRS secara sekaligus (*big bang*) atau secara bertahap (*gradual*), yang mana sampai Juli 2007 IFRS yang sudah diadopsi secara penuh oleh DSAK adalah:

- a. IAS 11 *Construction Contracts*
- b. IAS 16 *Property, Plant and Equipment*
- c. IAS 17 *Leases*
- d. IAS 18 *Revenues*
- e. IAS 19 *Employee Benefits*
- f. IAS 32 *Financial Instruments: Presentation*
- g. IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*
- h. IAS 40 *Investment Property*

Berdasarkan pengadopsian tersebut maka jelas akan ada perbedaan antara IFRS, U.S. GAAP dan PSAK. Akan tetapi untuk PSAK yang berlaku per 1 Januari 2008 tidak ada perbedaan dengan IFRS karena PSAK mengadopsi IFRS secara penuh, akan tetapi antara IFRS, PSAK dengan U.S. GAAP akan ada perbedaan. Penulis hanya akan membahas mengenai perbedaan antara IFRS, U.S. GAAP dan PSAK dalam hal properti investasi (*Investment Property*), khususnya mengenai perbedaan IFRS, U.S. GAAP dan PSAK dalam hal penyajian (*presentation*), pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pengungkapannya (*disclosure*).

Pembahasan

Konvergensi IFRS terhadap PSAK, tentunya akan berpengaruh terhadap dunia bisnis dan juga dunia pendidikan, khususnya pendidikan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, pengadopsian secara bertahap (*gradual*) lebih banyak digunakan oleh negara-negara berkembang karena adopsi IFRS memerlukan infrastruktur pendukung seperti kesiapan penyusun laporan keuangan, auditor, pendidik, profesi pendukung, dan regulator, adanya pasar yang menjadi acuan penerapan pengaturan akuntansi yang sarat dengan konsep *fair value*, serta regulasi yang tidak bertentangan dengan pengaturan dalam standar akuntansi, sehingga konvergensi secara bertahap (*gradual*) dipandang sebagai cara yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia (Hoesada, 2008). Manfaat yang akan diperoleh jika melakukan konvergensi standar akuntansi internasional (Hoesada, 2008), yaitu:

1. meningkatkan komparabilitas informasi keuangan yang berkualitas sehingga mengurangi biaya dana (*cost of capital*);
2. menarik investasi lintas negara melalui transparansi;
3. mempermudah akses investasi dan pendanaan dengan skala internasional;
4. meningkatkan integritas pasar modal secara global, memudahkan *dual listing*;
5. memudahkan konsolidasi laporan keuangan perusahaan multinasional.

Indonesia mengadopsi IFRS secara penuh salah satunya pada properti investasi (*Investment Property*). Properti investasi (*Investment Property*) menurut PSAK No. 13 Revisi 2007, paragraf 05 adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk: (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau (b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Contoh properti investasi (PSAK No. 13 Revisi 2007, paragraf 08) adalah:

1. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.
2. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan.
(Apabila entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai.)
3. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
4. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

Perbedaan antara IFRS, U.S. GAAP, dan PSAK mengenai properti investasi adalah:

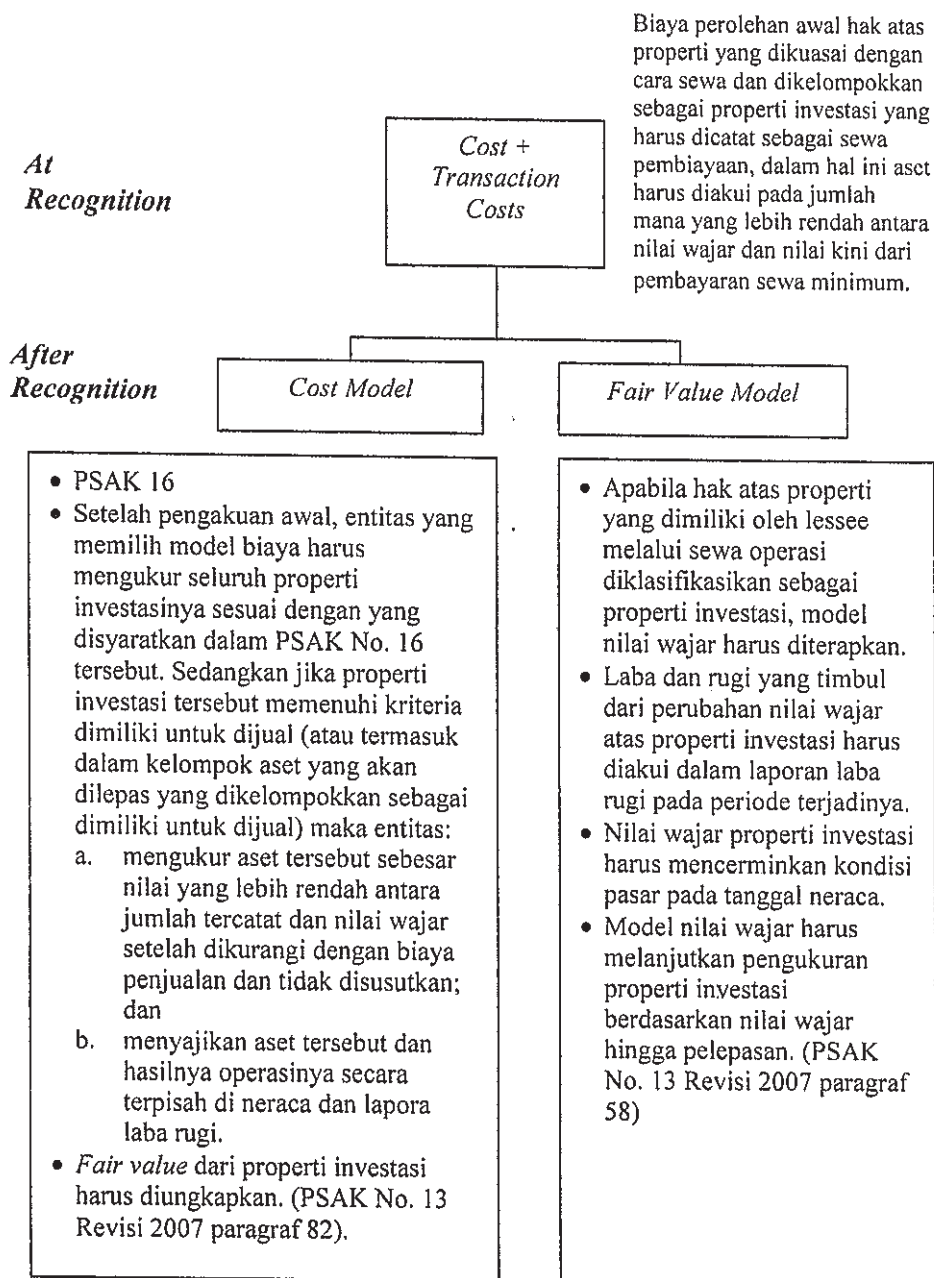
Tabel 1. Perbedaan IFRS, U.S. GAAP, dan PSAK

IFRS	U.S. GAAP	PSAK
IAS 40 " <i>Investment Property</i> "	Tidak diatur secara khusus mengenai properti investasi (<i>Investment Property</i>).	PSAK No. 13 (Revisi 2007) "Properti Investasi"
IAS 40 memberikan pedoman pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, transfer dan pelepasan properti investasi serta hal-hal apa saja yang harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan aktiva tersebut. IAS 40 memberikan dua alternatif pengukuran investasi properti, yaitu dengan menggunakan model biaya dan model nilai wajar yang harus diterapkan secara konsisten (IAS 40 paragraf 33 – 56).	Secara tegas U.S. GAAP tidak mengizinkan penggunaan model nilai wajar.	Sama seperti IAS 40 (PSAK No. 13 Revisi 2007 paragraf 20 – 35). Pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. (PSAK No. 13 Revisi 2007 paragraf 36 – 59). Model nilai wajar (<i>fair value model</i>) dan model biaya (<i>cost model</i>)

Sumber: Purba, 2008

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: (a) besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas; dan (b) biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal (PSAK No. 13 Revisi 2007, paragraf 16). Seperti yang sudah dijelaskan dikolom perbedaan IFRS, U.S. GAAP dan PSAK, bahwa pengukuran untuk properti investasi dalam IFRS dan PSAK dibagi menjadi dua yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal (*at recognition*) dan pengukuran setelah pengakuan awal (*after recognition*), dan ada dua alternatif pengukuran yang digunakan dalam properti investasi, yaitu pengukuran model biaya (*cost model*) dan pengukuran model nilai wajar (*fair value model*) yang harus diterapkan secara konsisten, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Perbedaan IFRS, U.S. GAAP, dan PSAK (Nunik L.D.)



Sumber: Sinaga, 2008

Antara IFRS dan PSAK dalam hal properti investasi tidak terdapat perbedaan karena PSAK mengadopsi secara penuh IFRS untuk properti investasi (*Investment Property*). Seperti yang diuraikan oleh Hoesada (2008) tidak ada perbedaan yang signifikan antara IAS 40 dan PSAK 13 Revisi 2007 mengenai properti investasi, hal tersebut dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

Tabel 2. Perbedaan IFRS dengan PSAK untuk Property Investasi

Topik	IAS 40 (IFRS) dan PSAK 13 Revisi 2007 (SAK per 1 Juli 2009)
Properti Investasi	Pemilihan pos khusus dari pos investasi dan pos aset tetap, terkait pada IFRS leasing.
Pengukuran Awal	<i>At cost</i> termasuk biaya transaksi, termasuk biaya <i>start up cost</i> , <i>abnormal waste</i> , kerugian operasi awal sebelum mencapai tingkat yang diharapkan.
Pengukuran Selanjutnya	<i>Fair value model</i> , perubahan <i>fair value</i> masuk laba rugi. <i>Cost model</i> , <i>depreciated cost</i> dikurangi kerugian penurunan nilai. <i>Fair value</i> diungkapkan.
<i>Property Held under an Operating Lease</i>	Dapat dilaporkan sebagai properti investasi bila memenuhi definisi properti investasi dan lessee menggunakan <i>fair value model</i> .

Sumber: Hoesada (2008)

Seperti yang sudah dijelaskan dikolom perbedaan IFRS, U.S. GAAP dan PSAK, dalam U.S. GAAP properti investasi ini tidak diatur secara khusus dan secara tegas U.S. GAAP tidak mengizinkan penggunaan model nilai wajar dalam pengukuran properti investasi. Dalam PSAK No. 13 Tahun 2004 yang masih mangacu pada U.S. GAAP, menunjukkan bahwa properti investasi ini tidak diatur secara khusus, karena PSAK No. 13 Tahun 2004 mengatur akuntansi untuk investasi secara umum dan properti investasi masuk didalamnya, berbeda dengan PSAK No. 13 Revisi 2007 yang mengadopsi IFRS properti investasi diatur secara khusus dalam PSAK No. 13 Revisi 2007 ini. Sehingga dalam PSAK No. 13 Tahun 2004, akuntansi untuk properti investasi mengikuti akuntansi untuk investasi secara umum.

U.S. GAAP secara tegas tidak mengizinkan penggunaan model nilai wajar dalam pengukuran properti investasi, sedangkan pengukuran dalam IFRS dan PSAK mengizinkan penggunaan model nilai wajar. Untuk dasar/basis pengukuran properti investasi antara IFRS dan U.S. GAAP berbeda, hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perbedaan IFRS dengan PSAK mengenai Model Nilai Wajar

IAS	Topik	IFRS	U.S. GAAP
IAS 40	Basis/dasar pengukuran untuk properti investasi.	Pilihan untuk (a) model biaya historis (depresiasi, <i>impairment</i>) atau (b) model nilai wajar dengan perubahan nilai melalui laba atau rugi.	Biasanya diminta untuk menggunakan model biaya historis (depresiasi, <i>impairment</i>).

Sumber: Deloitte, 2008

Pada IFRS dan PSAK ada pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal, sedangkan dalam U.S. GAAP tidak ada pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran pada saat pengakuan awal: (a) properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut; (b) biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan

Perbedaan IFRS, U.S. GAAP, dan PSAK (Nunik L.D.)

dikelompokkan sebagai properti investasi yang harus dicatat sebagai sewa pembiayaan seperti diatur paragraph 16 dalam PSAK No. 30 tentang Sewa, dalam hal ini aset harus diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum (PSAK No. 13 Revisi 2007 paragraph 20 dan 25). Pengukuran setelah pengakuan awal: "Suatu entitas dapat memilih menggunakan model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan kewajiban yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan nilai wajar dari, atau imbalan dari, aset tertentu termasuk properti investasi. Entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar, kecuali ada anggapan yang sulit dibantah bahwa entitas dapat menentukan nilai wajar properti investasi secara andal atas dasar berkelanjutan. Apabila hak atas properti yang dimiliki oleh lessee melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi, model nilai wajar harus diterapkan. Laba dan rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Nilai wajar properti investasi harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Dan model nilai wajar harus melanjutkan pengukuran properti investasi berdasarkan nilai wajar hingga pelepasan. Sedangkan entitas yang memilih menggunakan model biaya harus mengukur seluruh properti investasinya sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK No. 16 Revisi 2007 tentang Aktiva Tetap. Sedangkan jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset yang akan dilepas yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) maka entitas: (a) mengukur aset tersebut sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya penjualan dan tidak disusutkan; dan (b) menyajikan aset tersebut dan hasilnya operasinya secara terpisah di neraca dan laporan laba rugi." (PSAK No. 13 Revisi 2007 paragraph 20 – 59 mengenai pengukuran)

Dalam hal pengungkapan, PSAK No. 13 Tahun 2004 paragraph 44 (mengacu pada U.S. GAAP) menyatakan bahwa pengungkapan adalah tepat jika nilai wajar dari investasi properti yang dipertanggungjawabkan sebagai investasi jangka panjang tidak dicatat pada nilai wajar. Sedangkan pengungkapan dalam IFRS dan PSAK selain pengungkapan secara umum juga harus ditambah dengan pengungkapan model nilai wajar atau pengungkapan model biaya. Pengungkapan secara umum, adalah entitas harus mengungkapkan (PSAK No. 13 Revisi 2007 paragraph 78):

1. apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya;
2. jika model nilai wajar yang digunakan, apakah hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi;
3. jika pengklasifikasian sulit, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
4. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi;
5. sejauhmana penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan atas penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai, jika tidak ada penilaian seperti itu, hal tersebut harus diungkapkan;
6. jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi untuk penghasilan rental, beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan dan tidak menghasilkan pendapatan rental, perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi atas penjualan properti investasi;
7. eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan;

8. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.

Pengungkapan tambahan apabila entitas menerapkan model nilai wajar yaitu entitas harus mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan hal-hal: penambahan-penambahan; pelepasan-pelepasan; laba atau rugi neto dari penyesuaian nilai wajar; perbedaan nilai tukar neto; transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan perubahan lain. Sedangkan pengungkapan tambahan apabila entitas menerapkan model biaya yaitu entitas harus mengungkapkan: metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan-penambahan, pelepasan-pelepasan, penyusutan, jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai selama satu periode, perbedaan nilai tukar neto, transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri, dan perubahan lain; serta nilai wajar properti investasi, jika nilai wajar dari properti investasi tidak dapat diukur secara andal, tambahan pengungkapan diperlukan, termasuk jika mungkin kisaran estimasi dimana nilai wajar kemungkinan besar berada. (PSAK No. 13 Revisi 2007 paragraf 79 – 82 mengenai pengungkapan)

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat terlihat perbedaan antara IFRS, U.S. GAAP dan PSAK dalam hal properti investasi, mulai dari penyajian (*presentation*), pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pengungkapannya (*disclosure*). Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara IFRS, U.S. GAAP dan PSAK dalam hal properti investasi, mulai dari penyajian (*presentation*), pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pengungkapannya (*disclosure*) adalah sebagai berikut:

1. Dipandang dari sisi penyajian (*presentation*):
 - a. IFRS: IAS 40 menyajikan "*Investment Property*". Mengatur secara khusus mengenai properti investasi (*Investment Property*).
 - b. U.S. GAAP: Tidak menyajikan secara khusus mengenai properti investasi (*Investment Property*).
 - c. PSAK: PSAK No. 13 (Revisi 2007) menyajikan "*Investment Property*". Mengatur secara khusus mengenai properti investasi (*Investment Property*).
2. Dipandang dari sisi pengakuan (*recognition*):
 - a. IFRS: Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: (a) besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas; dan (b) biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal (PSAK No. 13 Revisi 2007, paragraf 16).
 - b. U.S. GAAP: Investasi berupa properti dapat merupakan investasi lancar atau investasi jangka panjang. Perusahaan harus menyajikan investasi lancar sebagai aktiva lancar dan investasi jangka panjang sebagai aktiva tidak lancar, jika tidak perusahaan harus membuat suatu perbedaan untuk tujuan pengukuran dan menentukan nilai tercatat untuk investasi.

Perbedaan IFRS, U.S. GAAP, dan PSAK (Nunik L.D.)

- c. PSAK: Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: (a) besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas; dan (b) biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal (PSAK No. 13 Revisi 2007, paragraf 16).
3. Dipandang dari sisi pengukuran (*measurement*):
 - a. IFRS: IAS 40 memberikan pedoman pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, transfer dan pelepasan properti investasi serta hal-hal apa saja yang harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan aktiva tersebut. IAS 40 memberikan dua alternatif pengukuran investasi properti, yaitu dengan menggunakan model biaya dan model nilai wajar yang harus diterapkan secara konsisten (IAS 40 paragraf 33 – 56).
 - b. U.S. GAAP: Secara tegas U.S. GAAP tidak mengizinkan penggunaan model nilai wajar.
 - c. PSAK: Sama seperti IAS 40 (PSAK No. 13 Revisi 2007 paragraf 20 – 35). Pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. (PSAK No. 13 Revisi 2007 paragraf 36 – 59). Model nilai wajar (*fair value model*) dan model biaya (*cost model*).
 4. Dipandang dari sisi pengungkapan (*disclosure*):
 - a. IFRS: Selain pengungkapan secara umum juga harus ditambah dengan pengungkapan model nilai wajar atau pengungkapan model biaya. Pengungkapan tambahan apabila entitas menerapkan model nilai wajar yaitu entitas harus mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan hal-hal: penambahan-penambahan; pelepasan-pelepasan; laba atau rugi neto dari penyesuaian nilai wajar; perbedaan nilai tukar neto; transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan perubahan lain. Sedangkan pengungkapan tambahan apabila entitas menerapkan model biaya yaitu entitas harus mengungkapkan: metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan-penambahan, pelepasan-pelepasan, penyusutan, jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai selama satu periode, perbedaan nilai tukar neto, transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri, dan perubahan lain; serta nilai wajar properti investasi, jika nilai wajar dari properti investasi tidak dapat diukur secara andal, tambahan pengungkapan diperlukan, termasuk jika mungkin kisaran estimasi dimana nilai wajar kemungkinan besar berada.
 - b. U.S. GAAP: Pengungkapan adalah tepat jika nilai wajar dari investasi properti yang dipertanggungjawabkan sebagai investasi jangka panjang tidak dicatat pada nilai wajar.
 - c. PSAK: Selain pengungkapan secara umum juga harus ditambah dengan pengungkapan model nilai wajar atau pengungkapan model biaya. Pengungkapan tambahan apabila entitas menerapkan model nilai wajar

yaitu entitas harus mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan hal-hal: penambahan-penambahan; pelepasan-pelepasan; laba atau rugi neto dari penyesuaian nilai wajar; perbedaan nilai tukar neto; transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan perubahan lain. Sedangkan pengungkapan tambahan apabila entitas menerapkan model biaya yaitu entitas harus mengungkapkan: metode penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan-penambahan, pelepasan-pelepasan, penyusutan, jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai selama satu periode, perbedaan nilai tukar neto, transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri, dan perubahan lain; serta nilai wajar properti investasi, jika nilai wajar dari properti investasi tidak dapat diukur secara andal, tambahan pengungkapan diperlukan, termasuk jika mungkin kisaran estimasi dimana nilai wajar kemungkinan besar berada.

Saran

Saran penulis untuk mengingat perbedaan yang paling signifikan antara IFRS, U.S. GAAP dan PSAK adalah dengan memandang pada sisi pengukuran (*measurement*), yang mana IFRS dan PSAK menggunakan model biaya dan model nilai wajar sedangkan dalam U.S. GAAP hanya menggunakan model biaya (biaya historis). Untuk memahami mengapa IFRS dan PSAK tidak ada perbedaan, hal tersebut terjadi karena PSAK mengadopsi IFRS secara penuh. Penulis juga berharap dengan adanya pengadopsian IFRS secara penuh mengenai properti investasi, informasi keuangan yang dihasilkan mengenai properti investasi adalah informasi yang berkualitas tinggi sehingga dapat diperbandingkan, investor-investor dapat membuat keputusan yang lebih baik (akses pendanaan internasional akan lebih terbuka), perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan khususnya mengenai merger dan akuisisi, dan akuntansi mengenai properti investasi menjadi lebih jelas karena sudah diatur secara khusus dalam standar (PSAK No. 13 Revisi 2007/SAK per 1 Juli 2009).

Daftar Pustaka

- Deloitte. 2008. *IFRSs and U.S. GAAP: A Pocket Comparison*. IFRS-U.S. GAAP Comparison 2008. <http://www.iasplus.com/country/usa.htm#ifrsus>
- Deloitte. *Summaries of International Financial Reporting Standards*. <http://www.iasplus.com/standard/ias40.htm>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Per 1 Oktober 2004. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Per 1 September 2007. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Per 1 Juli 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- George T. Tsakumis, David R. Campbell SR. and Timothy S. Douppnik. 2009. *IFRS: Beyond the Standards*. *Journal of Accountancy*. <http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2009/Feb/IFRSBeyondtheStandards>

Perbedaan IFRS, U.S. GAAP, dan PSAK (Nunik L.D.)

- Hardi. 2008. **Akuntansi Properti Investasi, perbedaan antara PSAK 13 (Revisi 2007) dengan IAS 40 (as revised in 2003).**
<http://hardijma.wordpress.com/2008/09/10/akuntansi-properti-investasi-perbedaan-antara-psak-13-revisi-2007-dengan-ias-40-as-revised-in-2003/>
- Hoesada, Jan. 2008. *Overview for Accounting Framework of IFRS*. Seminar dan Lokakarya IFRS for Today. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Hoesada, Jan. 2008. *Overview for First-Time Adoption of IFRS in Indonesia*. Seminar dan Lokakarya IFRS for Today. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- IASC Foundation Education. Technical Summary. *IAS 40 Investment Property*.
<http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/0E7AB953-8BE4-4799-97BC-A3BDE0B01A3E/0/IAS40.pdf>
- Purba, P. Marisi. 2008. *Main Differences between IFRS, U.S. GAAP and PSAK*. Seminar dan Lokakarya IFRS for Today. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Sinaga, U. Rosita. 2008. *Investment Property*. Seminar dan Lokakarya IFRS for Today. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Rindu Rika Gamayuni¹

ABSTRACT

The Indonesian Financial Accounting Standards needs to adopt IFRS, so that the Indonesian financial reports can be accepted globally and the Indonesian companies are able to enter the global competition to attract the international investors. Currently, the adoption by Indonesian PSAK is in the form of harmonization, which means partial adoption. However, Indonesian is planning to fully adopt the IFRS by 2012. Such an adoption will be mandatory for listed and multinational companies.

The decision as to whether Indonesia will fully adopt the IFRS or partly adopt for harmonization purposes needs to be considered carefully. Full adoption of IFRS will enhance the reliability and comparability of the financial reports internationally. However, it may contradict the Indonesian tax systems and other economic and political situations.

If Indonesia were to adopt fully the IFRS by 2012, the challenges are faced firstly by the academic society and the companies. The curriculum, syllabi, and literature need to be adjusted to accommodate the changes. These will take considerable time and efforts due to the many aspects related to the changes. Adjustments also need to be done by corporations or organizations, particularly those with international transactions and interactions.

Full adoption also means the changing of accounting principles that has been applied as accounting standards worldwide. This might not be achieved in a short period, due to a number of reasons: (1) accounting standards are highly related with the tax systems. Adoption to IFRS internationally may change the tax systems in each country that fully adopt the IFRS. (2) Accounting standards are accounting policies in order to fulfil the national political and economic necessities that vary in each country. This might be the significant challenges in fully adopting the IFRS.

Keyword : International Financial Reporting Standards, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, fully adoption, accounting policies, tax systems.

A. PENDAHULUAN

Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (*full adoption*) standar akuntansi internasional atau *International Financial Reporting Standard*¹

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

(IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Standards*), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan antarlain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Teknologi informasi yang berkembang pesat membuat informasi menjadi tersedia di seluruh dunia. Pesatnya teknologi informasi ini merupakan akses bagi banyak investor untuk memasuki pasar modal di seluruh dunia, yang tidak terhalangi oleh batasan negara, misalnya: Investor dari Belanda bisa dengan mudah berinvestasi di Jepang, Amerika, Singapore, atau bahkan Indonesia. Kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai FASB dan US GAAP, Indonesia memakai PSAK-nya IAI, Uni Eropa memakai IAS dan IASB. Hal tersebut melatarbelakangi perlunya adopsi IFRS saat ini.

Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Petreski, 2005).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau full adoption (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Pada tahun 2012 tersebut diharapkan Indonesia sudah mengadopsi keseluruhan IFRS, sedangkan khusus untuk perbankan diharapkan tahun 2010. Dengan pencanangan tersebut timbul permasalahan mengenai sejauhmana adopsi IFRS dapat diterapkan dalam Laporan Keuangan di Indonesia, bagaimana sifat adopsi yang cocok apakah adopsi seluruh atau sebagian (harmonisasi), dan manfaat bagi perusahaan yang mengadopsi khususnya dan bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, serta bagaimana kesiapan Indonesia untuk mengadopsi IFRS, mungkinkah tahun 2012 Indonesia mengadopsi penuh IFRS?

B. PEMBAHASAN

Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional

Choi dan Mueller (1998) mendefinisikan akuntansi internasional adalah akuntansi internasional yang memperluas akuntansi yang bertujuan umum, yang berorientasi nasional, dalam arti yang luas untuk: (1) analisa komparatif internasional, (2) pengukuran dan isu-isu pelaporan akuntansinya yang unik bagi transaksi bisnis-bisnis internasional dan bentuk bisnis perusahaan multinasional, (3) kebutuhan akuntansi bagi pasar-pasar keuangan internasional, dan (4) harmonisasi akuntansi di seluruh dunia dan harmonisasi keragaman pelaporan keuangan melalui aktivitas-aktivitas politik, organisasi, profesi dan pembuatan standar.

Choi, et al. (1999) menyatakan bahwa Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standart harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai Negara.

Saat ini harmonisasi standar akuntansi internasional menjadi isu hangat karena berhubungan erat dengan globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini. Globalisasi bisnis tampak dari kegiatan perdagangan antar negara yang mengakibatkan munculnya perusahaan multinasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus menerus berubah karena adanya globalisasi. Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.

IASC (*International Accounting Standard Committee*) adalah lembaga yang bertujuan merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan (Choi & Mueller, 1998). IFRS (*International Financial Accounting Standard*) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang (1). Menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan, (2). menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS, (3). dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

Sejarah, perkembangan, dan pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia

Sejarah dan perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Benkut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

- a) di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.
- b) sampai Thn. 1955 : Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.
- c) Tahun. 1974 : Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.
- d) Tahun. 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.
- e) Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)
- f) Sejak Tahun. 1994 : IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.
- g) Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.
- h) Tahun. 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya?

Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia

Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB (International Accounting Standards Board. Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS) tersebut.

Posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Tabel 1: IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008
1. IAS 2 Inventories
2. IAS 10 Events after balance sheet date
3. IAS 11 Construction contracts
4. IAS 16 Property, plant and equipment
5. IAS 17 Leases
6. IAS 18 Revenues
7. IAS 19 Employee benefits
8. IAS 23 Borrowing costs
9. IAS 32 Financial instruments: presentation
10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement
11. IAS 40 Investment property

Tabel 2: IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 4 Insurance contracts
3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
6. IAS 1 Presentation of financial statements
7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
8. IAS 28 Investments in associates
9. IFRS 3 Business combination
10. IFRS 8 Segment reporting
11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
12. IAS 12 Income taxes
13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets

Tabel 3: IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance
3. IAS 24 Related party disclosures
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 33 Earnings per share
6. IAS 34 Interim financial reporting
7. IAS 41 Agriculture

Untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual.

Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS

Sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan International financial reporting standards (IFRS). 5 butir PSAK yang telah direvisi tersebut antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No. 50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).

1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994),
2. PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan,
3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna Usaha.
4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu
5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

Kelima PSAK tersebut dalam revisi terakhirnya sebagian besar sudah mengacu ke IAS/IFRS, walaupun terdapat sedikit perbedaan terkait dengan belum diadopsinya PSAK lain yang terkait dengan kelima PSAK tersebut.

Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu :

1. PSAK No. 9 (Revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan;

2. PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap;
3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.

PSAK yang sedang dalam proses revisi

Ikatan Akuntan Indonesia merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012, untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sedang dalam proses merevisi 3 PSAK berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):

- PSAK 22 : *Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS 3 : Business Combination,*
- PSAK 58 : *Discontinued Operations, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations,*
- PSAK 48 : *Impairment of Assets, which is revised by reference to LAS 36 : Impairment of Assets*

Benikut adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):

- Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
- Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;
- Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Pengembangan PSAK untuk UKM dan kebutuhan spesifik nasional didahulukan.

Efek penerapan International Accounting Standard (IAS) terhadap Laporan Keuangan

Beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan efek penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Penelitian itu antara lain dilakukan oleh Barth, Landsman, Lang (2005), yang melakukan pengujian untuk membuktikan pengaruh Standar Akuntansi Internasional (SAI) terhadap kualitas akuntansi. Penelitian lain dilakukan oleh Marjan Petreski (2005), menguji efek adopsi SAI terhadap manajemen perusahaan dan laporan keuangan.

Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan perusahaan di Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban dan nilai buku ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS dibanding standar akuntansi Jerman, dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Adopsi SAI juga berdampak pada rasio keuangan, antarlain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku terhadap nilai pasar ekuitas, rasio Earning to Price.

Pricewaterhouse Coopers (2005) menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi tersebut akan berdampak pada berbagai area antara lain: *Product viability, Capital Instruments, Derivatives dan hedging, Employee benefits, fair valuations, capital allocation, leasing, segment reporting, revenue recognition, impairment reviews, deferred taxation, cash flows, disclosures, borrowing arrangements and banking covenants.*

Peranan dan keuntungan harmonisasi atau adopsi IFRS sebagai standar akuntansi domestik

Keuntungan harmonisasi menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002) adalah: (1) Informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, (2) Harmonisasi dapat menghemat waktu dan uang, (3) Mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah dalam melakukan training pada karyawan, (4) Meningkatkan perkembangan pasar modal domestik menuju pasar modal internasional, (5) Mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan operasional yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan pihak lain.

Pricewaterhouse Coopers (2005) dalam publikasinya "Making A change To IFRS" mengatakan: *"Financial reporting that is not easily understood by global users is unlikely to bring new business or capital to a company. This is why so many are either voluntarily changing to IFRS, or being required to by their governments. Communicating in one language to global stakeholders enhances confidence in the business and improves finance-raising capabilities. It also allows multinational groups to apply common accounting across their subsidiaries, which can improve internal communications, and the quality of management reporting and group decision-making. At the same time, IFRS can ease acquisitions and divestments through greater certainty and consistency of accounting interpretation. In increasingly competitive markets, IFRS allows companies to benchmark themselves against their peers worldwide, and allows investors and others to compare the company's performance with competitors globally. Those companies that do not make themselves comparable (or can't, because national laws stand in the way) will be at a disadvantage and their ability to attract capital and create value going forward will be undermined"*

Dalam publikasi tersebut, Pricewaterhouse Coopers sebagai perusahaan jasa profesional atau kantor akuntan terbesar di dunia saat ini, menyatakan bahwa laporan keuangan dituntut untuk dapat membenarkan informasi yang lebih dapat dipahami oleh pemakai global, dengan demikian dapat menarik modal ke dalam

perusahaan. Hal inilah yang mendorong atau menuntut perubahan peraturan akuntansi domestik ke arah IFRS. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara yang berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Dengan mengadopsi IFRS juga berarti meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi. Dengan mengadopsi IFRS kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini. Akan menjadi suatu kelemahan bagi suatu perusahaan jika tidak dapat diperbandingkan secara global, yang berarti kurang mampu dalam menarik modal dan menghasilkan keuntungan di masa depan.

Perlunya harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia

Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia sudah melakukannya namun sifatnya baru harmonisasi, dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional tersebut. Adopsi standar akuntansi internasional tersebut terutama untuk perusahaan publik. Hal ini dikarenakan perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional tetapi juga secara internasional. Jika ada perusahaan dari luar negeri ingin menjual saham di Indonesia atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar akuntansi yang dipergunakan dalam menyusun laporan.

Ada beberapa pilihan untuk melakukan adopsi, menggunakan IAS apa adanya, atau harmonisasi. Harmonisasi adalah, kita yang menentukan mana saja yang harus diadopsi, sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) nomor 24, itu mengadopsi sepenuhnya IAS nomor 19. Standar ini berhubungan dengan imbalan kerja atau employee benefit.

Kerugian apa yang akan kita hadapi bila kita tidak melakukan harmonisasi, kerugian kita berkaitan dengan kegiatan pasar modal baik modal yang masuk ke Indonesia, maupun perusahaan Indonesia yang listing di bursa efek di Negara lain. Perusahaan asing yang ingin listing di BEI akan kesulitan untuk menerjemahkan laporan keuangannya dulu sesuai standart nasional kita, sedangkan perusahaan Indonesia yang akan listing di Negara lain, juga cukup kesulitan untuk menerjemahkan atau membandingkan laporan keuangan sesuai standart di negara tersebut. Hal ini jelas akan menghambat perekonomian dunia, dan aliran modal akan berkurang dan tidak mengglobal.

C. RINTANGAN DALAM PROSES MENUJU HARMONISASI

Menurut Nobes dan Parker (2002), rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah: (1) perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara, (2) kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara, (3) perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara.

Menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002), hambatan dalam menuju harmonisasi adalah: (1) Nasionalisme tiap-tiap negara, (2) Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, (3) Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, (4) Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Tantangan atau rintangan bagi perusahaan.

Penerapan IFRS dalam sebuah perusahaan atau organisasi bukanlah suatu keharusan. Sebuah perusahaan ketika akan beralih ke IFRS terlebih dahulu akan mempertimbangkan cost and benefit-nya. Perusahaan akan menerapkan IFRS apabila memperoleh incremental benefit atas penerapan IFRS tersebut. Namun bagi perusahaan multinasional, wajib menerapkan IFRS dalam laporan keuangannya dikarenakan perusahaan ini berpatner dengan perusahaan-perusahaan lain secara global. Jika perusahaan multinasional tidak mau mengadopsi IFRS, maka ia akan ditinggalkan oleh patner usahanya yang membutuhkan laporan keuangan yang berstandar internasional.

IFRS adalah sebuah sistem pengukuran kinerja baru. Prinsip akuntansi yang baru ini harus di umumkan kepada semua pihak di sebuah perusahaan (organisasi). Merubah standar akuntansi dari standar domestik menjadi standar internasional bukanlah sekedar berganti aturan akuntansi semata, tetapi juga berarti perubahan dalam pola pikir pegawai accounting/keuangan dan bagian lain di perusahaan dalam bekerja, mereka dituntut untuk mengetahui dan bisa membuat laporan keuangan berstandar IFRS. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan usaha yang keras.

Tantangan atau rintangan bagi kalangan akademisi.

Indonesia akan mengadopsi IFRS secara penuh pada tahun 2012. Untuk tujuan itu, sampai dimana kesiapan kalangan akademisi khususnya bidang akuntansi di Indonesia? Mengingat kalangan akademisi adalah ujung tombak dalam mempersiapkan atau menghasilkan generasi-generasi penerus yang akan berhadapan langsung dengan IFRS dalam dunia kerjanya di masa depan. Apakah akademisi Indonesia (seperti guru, dosen dan guru besar akuntansi) sudah siap mengganti kurikulum, buku literatur, silabus dan bahan/alat ajar akuntansi lainnya? Mengubah kurikulum akuntansi bukanlah pekerjaan mudah, menyangkut banyak aspek.

Michael Cangemi (President dan CEO dari FEI) dalam tulisannya di "March issue" mengatakan: "This means that all of the GAAP books you own, everything you learned in college and in your entire career will change", semua buku mengenai GAAP yang anda miliki beserta segala sesuatu yang anda pelajari di sekolah dan *career* akan berubah. "Major accounting schools - the Universities of Texas, Illinois and Wisconsin - will teach IFRS", kata Larry Rittenberg, Ph.D., Ernst & Young professor, University of Wisconsin. Hampir semua universitas yang menyelenggarakan jurusan akuntansi di semua negara bagian amerika serikat telah memiliki kelas khusus IFRS, katanya, seperti di lansir oleh Financial Executive Online.

D. KESIMPULAN

1. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia perlu mengadopsi IFRS karena kebutuhan akan info keuangan yang bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.
2. Saat ini, adopsi yang dilakukan oleh PSAK Indonesia sifatnya adalah harmonisasi, belum adopsi secara utuh, namun indonesia mencanangkan akan adopsi seutuhnya IFRS pada tahun 2012. Adopsi ini wajib diterapkan terutama bagi perusahaan publik yang bersifat multinasional, untuk perusahaan non publik yang bersifat lokal tidak wajib diterapkan.
3. Perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi sifat adopsi apa yang cocok diterapkan di Indonesia, apakah adopsi secara penuh IFRS atau adopsi IFRS yang bersifat harmonisasi yaitu mengadopsi IFRS disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Adopsi secara penuh IFRS akan meningkatkan keandalan dan daya banding informasi laporan keuangan secara internasional, namun adopsi seutuhnya akan bertentangan dengan sistem pajak pemerintahan Indonesia atau kondisi ekonomi dan politik lainnya. Hal ini merupakan rintangan dalam adopsi sepenuhnya IFRS di Indonesia.
3. Untuk mencapai adopsi seutuhnya (*full adoption*) pada 2012, tantangan terutama dihadapi oleh kalangan akademisi dan perusahaan di Indonesia. Jika ingin full adoption IFRS pada tahun 2012, berarti sebelum tahun 2012 kalangan akademisi khususnya bidang akuntansi harus siap terlebih dahulu terhadap perubahan ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap kurikulum, silabi, dan literatur. Penyesuaian terhadap perubahan ini memerlukan waktu dan usaha yang keras, karena penyesuaian terhadap peraturan yang baru menyangkut banyak aspek dan bukanlah hal yang dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Bagi perusahaan atau organisasi, perubahan dilakukan terutama oleh perusahaan go publik atau perusahaan multinational yang melakukan transaksi dan berinteraksi dengan perusahaan lainnya secara internasional.
4. Adopsi seutuhnya (*full adoption*) terhadap IFRS, berarti merubah prinsip-prinsip akuntansi yang selama ini telah dipakai menjadi suatu standar akuntansi bedaku

secara internasional. Hal ini kemungkinan besar tidak akan dapat tercapai dalam waktu dekat, mengingat kendala yang dihadapi antarlain: (1) standar akuntansi sangat berhubungan dengan sistem perpajakan. Sistem perpajakan setiap negara bervariasi. Jika prinsip akuntansi distandarkan secara internasional, berarti sistem perpajakannya juga harus distandarkan secara internasional, masalahnya mungkinkah ini terjadi? (2) standar akuntansi adalah suatu kebijakan akuntansi yang dibuat berdasarkan kebutuhan politik dan ekonomi suatu negara. Politik dan ekonomi setiap negara bervariasi, sehingga masalah politik dan ekonomi akan selalu menjadi hambatan dalam adopsi IFRS secara utuh dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Fahmi. 2008. Bank wajib terapkan revisi PSAK pada 2010. *Bisnis Indonesia*. <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/keuangan/1id39361.html>
- American Institute Certified Public Accountants. 2008. *IFRS: An AICPA (American Institute Certified Public Accountants) Background*. Newyork. www.IFRS.com. 1 April 2009.
- American Institute Certified Public Accountants. 2008. *IFRS Primer for Audit Committees*. Newyork. www.IFRS.com. 1 April 2009.
- Ashbaugh and Pincus. 1999. "Domestic Accounting Standard, International Accounting Standards, and The Predictability of Earning".
- Barth, Landsman and Lang. 2005. "International Accounting Standards and Accounting Quality". *Journal of Accounting*.
- Basir, Syarif. 2008. Adopsi Standar Auditing dan Assurance Internasional, Sudah Sampai Dimana?. *Majalah Akuntan Indonesia* edisi No. 6 Tahun II Maret 2008.
- Belkaoui, Ahmed, 1998, *Accounting Theory*, Penerjemah Marwata, dkk., Salemba Empat, Jakarta.
- Choi, Frederich, D.S.Frost, Carol A. and Meek, Gary K. 1999. *International Accounting*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NY.
- Choi & Mueller. 1998. *Akuntansi Internasional*. Salemba Empat. Jakarta.
- Delloitte News Letter. 2007. *IFRS Convergence Planning. The Standards Up Date*, Vol.1. 24 September 2007. www.auditnepost.blogspot.com. (Desember 2008).

- Hardi. 2008. SPAP, kapan full adoption ke ISA ? www.auditnepost.blogspot.com (Desember, 2008)
- Hardi. 2008. 3 PSAK revisian DSAK-IAI berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. Sudah siapkah Anda ? <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/keuangan/1id39361.html>, (Februari, 2009).
- Hendricksen, Eldon S. (Marianus Sinaga, Editor), 1996, *Teori Akuntansi*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Hung and Subramanyan. 2004. "Financial Statement Effects of Adoption International Accounting Standards: The Case of Germany". *Working Paper, University of Southern Carolina*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Program Konvergensi IFRS 2009*. www.iaiglobal.or.id. 3 April 2009.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Prinsip Akuntansi: Sejarah SAK*. www.iaiglobal.or.id
- International Accounting Standards Committee. 1999. *International Accounting Standards 1999*.
- Kanaka Puradiredja Suhartono. Public Accountant, tax and business advisory services. 2009. Menuju Konvergensi IFRS di tahun 2012. www.kanaka.co.id. 3 April 2009.
- Kanaka Puradiredja Suhartono. Public Accountant, tax and business advisory services. 2009. Konvergensi IFRS di Indonesia. www.kanaka.co.id. 3 April 2009.
- Lecturer Ph. Diaconu Paul. 2002. "Harmonization of The International Accounting System". *Academy of Economic Studies Bucharest*.
- Osman Ramli Satrio dan rekan. 2007, a member of deloitte Touche Tohmatsu. IFRS and Indonesian GAAP: a Comparison. Deloitte, audit and assurance.
- Petreski, Marjan. 2005. "The Impact of International Accounting Standards on Firms".
- Pricewaterhouse Coopers. 2005. Similarities and Differences: a Comparison of IFRS, Indonesian GAAP, US GAAP. Published by *Kantor Akuntan Haryanto Sabari dan rekan*.

- Saudagaran, Sharokh. 2001. *"International Accounting: A User Perspective"*. Thompson Learning.
- Syafri Adnan dan Jamason Sinaga. 2005. *Peningkatan Standar Akuntansi Internasional (Improvement to International Public Sector Accounting Standards)*.
- Tarca, Ann. 2002. "International Convergence of Accounting Practise: Choosing Between IAS and US GAAP". *University of Western Australia*.
- Zaitul. 2003. Tinjauan Kritis tentang Pengaruh Budaya Terhadap Sistem Akuntansi. *Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.